



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202107914, 22 Januari 2021

Pencipta

Nama : **Mujahiddin, S.Sos., M.SP**
Alamat : Jl. Brigjen Hamid Gg. Famili, Titi Kuning, Medan Johor, Medan,
SUMATERA UTARA, 20146
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Mujahiddin, S.Sos., M.SP**
Alamat : Jl. Brigjen Hamid Gg. Famili, Titi Kuning, Medan Johor, Medan,
SUMATERA UTARA, 20146
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Ilmiah**
Judul Ciptaan : **TATA RUANG KOTA DAN KEKALAHAN UMAT ISLAM DALAM
PEMBANGUNAN**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 16 Mei 2016, di Medan
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1
Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000234402

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



the 9th International Workshop on Islamic Development

**Workshop Antarbangsa
Pembangunan Berteraskan Islam
(WAPI)**

Medan, May 16, 2016



Proceedings Abstracts



9 706026 337142

TATA RUANG KOTA DAN KEKALAHAN UMAT ISLAM DALAM PEMBANGUNAN¹

H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP
Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU
Muja_mba@yahoo.com

ABSTRAK

Satu di antara berbagai aplikasi pembangunan adalah tata ruang. Bentuk tata ruang di perkotaan biasanya dijadikan sebagai identitas bagi kota tersebut dengan menggambarkan nuansa keagamaan dan budaya lokal. Namun tidak selamanya, konsep tata ruang tersebut dapat menggambarkan identitas atau nuansa keagamaan dan budaya lokal masyarakat perkotaan. Hal ini bisa dilihat dari bentuk tata ruang Kota Medan yang tidak menggambarkan identitas melayu-muslim. Begitu juga dengan Ibu Kota DKI Jakarta yang tidak lagi memperlihatkan identitas betawi-muslim pada tata ruang kotanya.

Hal tersebut bisa dilihat dari tidak tersedianya tempat beribadah atau musala bagi umat islam di pusat-pusat perbelanjaan secara representative. Hampir rata-rata musala di plaza atau mall berada di lokasi parkir. Aksesnya juga sangat jauh dengan menempatkan di lantai paling atas atau basement (lantai bawah). Bahkan terkadang kita juga bisa merasakan bau yang tidak sedap dari dalam musala.

Kondisi ekonomi dan politik umat islam dinilai menjadi faktor penyebab utama kekalahan umat islam dalam pembangunan, khususnya menyangkut tata ruang kota. Untuk itu, tulisan ini selanjutnya akan membahas tentang bagaimana mengatasi persoalan ekonomi-politik umat dengan membangun gerakan islam yang terstruktur dengan fokus utamanya adalah melakukan pemberdayaan kepada umat baik dalam konteks ekonomi, sosial dan politik.

Kata Kunci: Tata Ruang Kota, Pembangunan dan Kekalahan Umat Islam

PENDAHULUAN

Pernahkah anda melihat tata ruang Kota Medan dari atas gedung pencakar langit? Jika pernah, berapa banyak menara-menara masjid yang bisa anda lihat dari atas gedung itu? Terlihat jelas atau samar-samarkah? Atau jangan-jangan sudah tidak terlihat sama sekali? Pertanyaan ini penting untuk kita ajukan di tengah arus pembangun yang tidak lagi melihat rumah ibadah – khususnya masjid – sebagai satu hal yang penting.

¹ Pertamakali Dipublikasikan pada The 9th Internasional Workshop On Islamic Development Medan, 16 May 2016, Gedung Pasca Sarjana UMSU

Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidaklah sepenuhnya salah. Namun pembangunan juga harus memberikan tempat yang cukup pada budaya-agama (*religious-culture*). Sebab masjid sebagai simbol keagamaan dan tempat sosialisasi (penyaluran) nilai dan moral agama terhadap masyarakat kini telah tergerus dengan pertumbuhan mall, plaza, pusat bisnis, dan perumahan.

Fakta ini yang kemudian membuat kita sulit menemui masjid di pusat Kota Medan. Jikapun ada kita harus masuk ke gang-gang dan lorong-lorong pemukiman warga. Beberapa di antaranya masjid bahkan harus berdampingan dengan plaza, mall dan hotel. Kita bisa lihat pada Masjid Agung Medan yang berdampingan dengan Sun Plaza. Masjid Raya Al Maksum Medan yang berdampingan dengan Yuki Simpang Raya dan Madani Hotel. Salahkah? Tentu tidak. Tetapi, adakah konsep tata ruang yang lebih baik dan “tidak memaksa” menara-menara masjid untuk berdampingan dengan gedung-gedung tinggi lainnya?

Tentunya, konsep tata ruang atau *landcape* kota yang islami akan sangat sulit untuk kita temui hari ini, khususnya di Kota Medan. Sebab skema pembangunan kawasan saat ini telah didisain serius oleh sekelompok pemodal kuat dan membawa dampak yang begitu besar bagi keberadaan masjid serta kawasan pemukiman warga yang berada di perkotaan. Arus perpindahan warga kota yang kebanyakan beragama islam ke daerah pinggiran –mendekati wilayah Deli Serdang – membuat kota ini diisi dan dikuasai oleh sekelompok pemodal yang entah dari mana asalnya kita tidak pernah tau.

Kasus robohnya beberapa masjid di Kota Medan dengan dalih pembangunan menjadi bukti kuat bahwa kondisi sosial dan ekonomi satu umat beragama tidak berguna bila kekuatan ekonomi secara fundamental tidak dapat dikuasai. Tidak mengherankan jika penguasaan modal ekonomi menjadi begitu penting untuk mempertahankan eksistensi satu umat. Apalagi ditengah kehidupan yang cenderung pragmatis dan selalu menomer satukan materi. Moral keagamaan hilang, suap-menyuap menjadi satu hal yang biasa dalam proses pengambilan kebijakan. Di sinilah pemilik modal memainkan peran yang besar untuk mempengaruhi seorang pemimpin daerah dalam mengambil kebijakan tata ruang kota yang sekarang cenderung tidak menunjukkan satu identitas budaya-agama (*religious-culture*) lokal.

Meski para pemimpin pemerintahan hari ini –presiden, gubernur, bupati dan walikota –adalah mereka yang memeluk agama islam tetapi tidak sertamerta mempengaruhi sikap mereka untuk membela kepentingan umat islam. Sebab dalam proses pemilihan kepala daerah, mereka telah banyak berhutang pada para pemilik modal yang hampir rata-rata bukanlah seorang muslim. Tidak salah jika hutang modal tersebut dibalas dengan pembangunan proyek-proyek skala besar yang menembus batas-batas tata ruang kota dan terus berkelanjutan. Di sinilah *religious-culture* islam hilang. Masjid dan umat islam menjadi korban dari keberingasan pembangunan.

Satu di antara beberapa aplikasi perencanaan pembangunan adalah tata ruang. Bentuk tata ruang setidaknya harus dapat menggambarkan nuansa keagamaan dan kebudayaan lokal yang dalam

kasus ini kita sebut dengan istilah *relegius culture local* (budaya agama lokal). *Relegius culture local* dapat dicontohkan dengan model identitas keagamaan yang dekat dengan satu kelompok budaya lokal, misalnya budaya betawi yang dekat dengan nilai-nilai keislaman. Begitu juga dengan budaya melayu yang sangat identik dengan nilai keislaman.

Masih banyak contoh-contoh budaya lain yang bisa kita ambil dari model *relegius culture local* ini. Namun, setidaknya dua budaya tersebut dapat mewakili banyak *relegius culture local* dari budaya-budaya lainnya di Indonesia. Apalagi pengambilan sampel dua budaya agama lokal ini terkait dengan kota yang menjadi basis pemukimannya. Hal ini dikarenakan kedua kota tempat bermukimnya dua suku tersebut –yaitu Jakarta dan Medan –sedang mengalami perkembangan pembangunan yang luar biasa. Sayangnya, pembangunan yang melanda kedua kota tersebut tidak pernah menyediakan tempat bagi *relegius local culter* secara representative.

Contoh sederhana dari bentuk tidak tersedianya tempat secara representative bagi *relegius culture local* adalah ketersediaan tempat beribadah atau musala bagi umat islam di pusat-pusat perbelanjaan. Meski di beberapa plaza sudah disediakan musala untuk pelaksanaan solat lima waktu bagi karyawan dan konsumen tetapi jika dilihat masih banyak musala yang sama sekali tidak representative untuk pelaksanaan ibadah solat tersebut. Tidak percaya? Silahkan cek saja di beberapa plaza di Kota Medan.

Hampir rata-rata musala berada di lokasi parkir. Aksesnya juga sangat jauh dengan menempatkan di lantai-lantai paling atas atau *basement* (lantai bawah). Tidak jarang kita juga bisa merasakan bau yang tidak sedap dari hambal musala dan belum lagi mukenah yang tampak tidak terurus. Fakta ini tidak hanya terjadi di plaza-plaza saja, tetapi juga terjadi di pusat-pusat pasar, hotel, perkantoran atau instansi –pemerintah atau swasta –dan lokasi-lokasi publik lainnya. Padahal di dalam lokasi atau ruang-ruang tersebut terdapat banyak individu muslim yang sedang bekerja atau bahkan sedang menjadi pengunjung dan pembeli. Sekali lagi, kita patut bertanya layakkah kondisi seperti ini kita dapatkan di tengah kebutuhan ibadah solat kita yang sehari-hari dilaksanakan lima waktu?

Pada skala makro, posisi tata ruang umat islam dalam pembangunan harus dapat diperjelas. Apalagi di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya adalah muslim. *Landscape* kota islam dengan budaya lokal sebagai identitasnya penting untuk diwujudkan. Di Kota Medan, *landscape* kota islam bisa diwujudkan dari penguatan kembali dan menghidupkan suasana keislaman dari lokasi Masjid Raya Al-Mahsun, Taman Sri Deli dan Istana Maimun. Di mana sepanjang lokasi jalan tersebut harus dapat menunjukkan suasana ke-islaman dengan penguatan identitas Kesultanan Deli. Apalagi satu sejarah panjang perkembangan islam di Kota Medan ada di tempat tersebut.

Selain itu, kebijakan untuk menerapkan ornament-ornamen melayu pada kantor-kantor pemerintahan di Kota Medan juga patut untuk dipertimbangkan. Hal ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Bachtiar Djafar dan kebijakan tersebut dapat membentuk identitas Kota

Medan sebagai kota islam dengan identitas lokal melayu. Namun begitupun, tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut kembali, kondisi ekonomi dan politik umat islam yang lemah membuat umat islam kalah dan tersisihkan dalam pembangunan. Hal ini bisa dilihat dan dirasakan dalam kasus tata ruang kota yang tidak representative bagi umat islam.

PEMBAHASAN

1. Kondisi Ekonomi-Politik

Dua faktor pendukung yang sangat berpengaruh dan menyebabkan umat islam semakin terpinggirkan dari tata ruang kota adalah; melemahnya peran umat islam di bidang ekonomi dan melemahnya kekuatan politik islam. Padahal kedua aspek ini sangatlah vital dan tidak bisa ditinggalkan dalam satu perjuangan.

Kondisi ekonomi umat hari ini bisa digambarkan dengan banyaknya umat islam yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Mungkin hal ini wajar, sebab mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat Islam. Namun, mengapa mayoritas penduduk itu tidak bisa menikmati kue pembangunan? Ini tentu bisa dijelaskan dengan asumsi 88 persen orang terkaya di Indonesia adalah mereka yang bukan beragama Islam. Sehingga serpihan-serpihan kue pembangunan tidak dirasakan dengan maksimal oleh umat islam. Ketimpangan ekonomi antar umat beragama menjadi semakin jelas. Ketimpangan tersebut membuat penduduk muslim hari ini harus terus tergerus kepinggiran kota sebab kepemilikan *capital* yang rendah dan tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin besar membuat banyak penduduk muslim menjual asset-asetnya (rumah dan tanah).

Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana wajah-wajah gelandangan dan pengemis (gepeng) yang ada dipinggir jalan. Mereka selalu saja menggunakan simbol-simbol keislaman meski sepenuhnya belum tentu dari mereka adalah pemeluk agama islam. Contoh lain yang bisa dilihat dari lemahnya ekonomi umat islam hari ini adalah pada saat pembagian zakat yang selalu memakan korban. Antrian panjang, berdesak-desakan dan lain sebagainya. Terlihat bagaimana realitas kemiskinan masih berada di sekitar kita.

Kemiskinan tersebut yang kemudian menjadikan umat islam sangat mudah digoyahkan. Tak jarang, demi uang dan sebungkus sembako terkadang kita rela untuk melakukan apa saja yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Itu sebabnya mengapa rosul mengatakan kemiskinan sangat dekat dengan ke kafiran. Sekarang ini, Indonesia bahkan sedang mengalami darurat pemurtadan. FUI melalui data yang dikeluarkan Mabes Polri mengatakan orang yang murtad di Indonesia saat ini sebanyak 2,7 juta orang per tahun.² Jumlah itu tidaklah sedikit dan angkanya dari tahun ke tahun terus saja mengalami peningkatan yang signifikan.

² Lihat: <http://panjimas.com/news/2014/10/27/fui-indonesia-darurat-pemurtadan-bocoran-mabes-polri-27-juta-orang-murtad-tiap-tahun/> (diakses pda tanggal 24 April 2016)

Kelemahan kita pada pondasi ekonomi berujung pada lemahnya pondasi politik kita hari ini. Demokrasi di Indonesia yang memakan biaya mahal selalu membuat para pejabat di ranah eksekutif dan legislative harus berhutang pada pengusaha yang rata-rata bukan seorang muslim. Hutang tersebut dilakukan untuk memenuhi biaya kampanye politik. Tak pelak, hasil yang bisa dilihat adalah kebijakan yang mereka ambil selalu saja merugikan ke pentingan umat islam, sebab mereka sudah tersandra oleh politik balas budi.

Selain itu, pondasi politik umat islam pada lever *grassroots* juga sering terpecah belah. Politik uang yang dimainkan kepada pemilih-pemilih islam yang rata berada di bawah garis kemiskinan membuat pemilih islam kehilangan rasa rasionalitas ke-imaan dalam memilih partai politik, calon-calon wakil rakyat dan calon pejabat pemerintahan.

Hal ini secara tidak langsung berpengaruh pada makin rendahnya pemilih partai-partai berazaskan islam. Lihatlah, rata-rata partai yang berazaskan islam setiap pemilu selalu mengalami penurunan jumlah suara yang relatif besar. Penurunan jumlah suara ini kemudian diantisipasi dengan strategi mengubah asas partai menjadi partai yang nasionalis dan atau pluralis sehingga mereka dapat menarik suara di luar basis islam. Caranya adalah dengan memberikan ruang kepada caleg-caleg yang non-muslim untuk dapat mendaftar menjadi pengurus partai dan perwakilan partai di legislative.

Kondisi umat islam hari ini sebenarnya telah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Kuntowijoyo dalam bukunya *Paradigma Umat Islam; Interpretasi Untuk Aksi*.³ Dalam buku ini Kuntowijoyo menjelaskan tentang konsep realitas ganda yang sedang diderita oleh umat islam. Realitas pertama adalah realitas dunia (*empiris*) yang membentuk struktur objektif. Realitas ini dapat dijelaskan dengan terbaginya masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial, jenjang pendidikan, usia, dan jenis kelamin.

Pemisahan manusia ke dalam kelompok kelas atau golongan oleh realitas empiris ini dapat diimbangi oleh realitas kedua yaitu realitas normatif yang membentuk struktur subjektif dengan konsep keumatan. Konsep ini selanjutnya menimbulkan kesatuan yang bersifat normatif. Sebagai unit yang normatif umat merupakan konsep yang mempersatukan kepentingan-kepentingan individu dalam jama'ah, hal itu kemudian yang menimbulkan struktur yang bersifat subjektif. Namun, sebagai suatu kenyataan yang empiris, bagaimanapun juga umat terbagi dan terpecah-pecah dalam pengelompokan golongan-golongan maupun kelas, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Kenyataan itulah yang membuat umat Islam amat sulit menyatu selain dari pada faktor kepentingan untuk beribadah kepada sang khalik (seperti solat jam'ah dan berhaji). Sisanya umat Islam lebih sering tidak peduli terhadap sesamanya, kurangnya perhatian kepada golongan *dhu'afa*, *mustadh'afin*, *fakir* dan *masakin* membuat jumlah mereka semakin banyak dan ironisnya mereka harus bertempur sendiri dalam pusaran pembangunan yang kapitalistik.

³ Lihat: Kuntowijoyo, *Paradigma Umat Islam; Interpretasi Untuk Aksi*, Jakarta: Mizan, 2008.

2. Membangun Gerakan Islam Strukturalis

Kondisi umat islam yang semakin tidak berdaya dalam kehidupan berbangsa hari ini –khususnya dalam bidang ekonomi-politik –harus segera diatasi dengan membangun gerakan islam yang terstruktur dengan fokus utamanya adalah melakukan pemberdayaan kepada umat baik dalam konteks ekonomi, sosial dan politik. Gerakan pemberdayaan dengan jalan strukturalis seperti yang telah dilakukan oleh Samahudin, Tjokroaminoto, dan KH Ahmad Dahlan ratusan tahun silam harusnya dapat dirumuskan kembali oleh para pemikir, tokoh dan pemimpin-pemimpin umat islam hari ini.

Kita sebenarnya tidak perlu lagi berdebat pada persoalan islam nusantara atau islam berkemajuan. Tetapi yang terpenting kini, bagaimana membangun umat islam yang berdaya baik secara ekonomi, sosial dan politik dengan formulasi-formulasi yang bisa menjawab persoalan yang dihadapi oleh umat. Sebab, pembangunan yang berdimensi kapitalistik saat ini, cenderung menempatkan umat islam pada posisi yang kalah.

Fakta ini bisa kita lihat pada bidang ekonomi misalnya, sebagai umat yang mayoritas kita justru tidak dapat menikmati kue pembangunan dengan maksimal. Hal ini bisa dijelaskan dengan asumsi 88 persen orang terkaya di Indonesia adalah mereka yang non-muslim. Efek yang dapat dilihat adalah banyaknya umat islam yang berada di bawah lingkaran kemiskinan dan ini membuat kesenjangan antar umat beragama semakin terasa. Padahal secara finansial, umat islam mempunyai modal yang besar yang dapat dikelola dari dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Jika dana ini dikelola dengan baik dan akuntabel, sesuai dengan kebutuhan umat (baik dalam jangka pendek atau jangka panjang), maka yakin dan percayalah islam yang berdaya akan muncul dan dapat bersaing dengan umat-umat yang lainnya.

Namun sayangnya, sampai saat ini, potensi yang dihasilkan dari ZIS belum dapat terkelola dan tersalurkan dengan tepat. Padahal Jumlah dana yang berhasil dikumpulkan masyarakat umum di Indonesia dari ZIS dalam setahun mencapai Rp 19,3 triliun. Hal ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan Center for the Study of Religion and Culture (CSRS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2005 lalu.⁴ Selain itu, hasil survei CSRS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mengungkapkan besarnya jumlah aset wakaf di Indonesia yang mencapai Rp 590 triliun dan aset-aset wakaf tersebut menurut CSRS sebagian besar diperuntukkan membangun kompleks pemakaman dan masjid-masjid mewah yang terkadang berada di antara permukiman kumuh. Namun sayang, dana yang berhasil dikumpul tersebut belum juga mampu mengatasi persoalan kemiskinan umat islam di Indonesia sampai saat ini.

Jika saja, dana infak dan sedekah atau aset wakaf yang ada di Indonesia diperuntukkan kepada kegiatan-kegiatan ekonomi yang lebih produktif tentunya dana yang ada tersebut akan terus

⁴ Lihat: Ahmad Gaus AF, *Filantropi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.

berkembang dan dapat memajukan serta memberdayakan umat islam. Mengapa kita tidak mencipta grosir atau minimarket seperti indomaret atau alfamart yang berbasis islam atau dikelola oleh badan-badan usaha islam?

Setidaknya dengan adanya badan-badan usaha tersebut kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda/i muslim yang lebih banyak lagi. Keuntungan dari penjualan tersebut juga bisa mendanai kepentingan-kepentingan agama seperti pembangunan masjid, membiayai panti asuhan dan lain sebagainya. Selama ini kita hanya dijadikan pasar konsemen yang empuk bagi para pemodal-pemodal yang bukan seorang muslim. Dampaknya, uang kita banyak tersedot tanpa ada implikasi bagi perkembangan agama.

Selain itu, secara makro ekonomi, kita juga belum memiliki bank yang memang benar-benar berpihak kepada umat islam. Sejauh ini, bank-bank kita hanya berbasis syariah saja. Tetapi semangatnya belum tentu dapat mengcover kepentingan-kepentingan umat, khususnya bagi mereka –muslim –yang berprofesi sebagai pengusaha atau pelaku-pelaku UMKM.

Ini yang kemudian menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi kita, khususnya bagi dua ormas besar islam di Indonesia yakni N.U dan Muhammadiyah. Harusnya, untuk menjawab tatangan umat hari ini, kita sudah bisa mendirikan Bank Muhammadiyah atau Bank N.U atau setidaknya pada level yang lebih mikro kita bisa menciptakan Muhammadiyah-mart atau N.U-mart.

Pembentukan bank atau mini-market tersebut tentu menggunakan pertimbangan yang jelas. Secara institusional N.U dan Muhammadiyah dapat dikategorikan sebagai sumber sosial umat yang memiliki jumlah anggota dan asset (amal usaha/badan usaha) yang sangat besar. Besarnya jumlah anggota secara kuantitas dapat dijadikan konsumen utama bagi bank atau mini-market yang ada. Apalagi ditambah dengan amal usaha seperti; sekolah, kampus, rumah sakit dan panti-panti asuhan yang secara langsung atau tidak dapat juga dijadikan mitra untuk pengembangan usaha ini.

Dengan terbentuknya koalisi dagang seperti ini, maka umat islam akan jauh lebih kuat dan lebih berdaya. Sebab, bagaimanapun juga, sejarah mencatat selain faktor politik, faktor ekonomi juga menjadi faktor yang dominan untuk menentukan keberhasilan gerakan dakwah dan islamisasi di Indonesia.

3. Meningkatkan Kesadaran Berpolitik hapus *Money Politik*

Tidak bisa dipungkiri bahwa politik dan ekonomi adalah dua hal yang berbeda tetapi saling mempengaruhi. Kemiskinan umat islam hari ini tidak hanya dapat dijelaskan dengan tingkat pendapatan rata-rata individu muslim saja, tetapi juga bisa dijelaskan dengan tingkat pendidikan politik individu tersebut. Prof. Jawahir Thontowi –dari FH UII Yogyakarta –mengistilahkan ini dengan membagi kemiskinan.⁵ Menurutnya persoalan kemiskinan yang dihadapi umat islam hari

⁵ Lihat: <http://m.voaindonesia.com/a/cendekiawan-muslim-berharap-kongres-efektif-tingkatkan-peran-umat-islam-iindonesia/2639978.html> (diakses pda tanggal 24 April 2016)

ini berpengaruh pada kesadaran berpolitik. Praktek *money politics* yang selama ini dilakukan oleh parpol membuat masyarakat tidak hanya miskin secara uang tetapi juga miskin pengetahuan dalam konteks kesadaran politik.

Uang selalu menjadi tujuan utama tanpa pernah memahami realitas politik yang ada dibaliknya. Transaksi politik ini bahkan sering terjadi di tempat-tempat pengajian atau perwiritan. Pendidikan politik –yang *berakhlaqul karimah* –menjadi hilang. Ironisnya, calon-calon dari parpol islam juga tidak bisa menolak godaan melakukan praktek-praktek *money politics* ini di setiap *event* pemilu atau pilkada.

Begitupun, parpol-parpol islam tidak juga mampu menarik minat yang banyak dari masyarakat. Bahkan secara politis parpol islam cenderung hanya menjadi pelengkap saja. Tidak ada keberanian untuk membangun koalisi bersama dalam mendukung satu calon presiden atau kepala daerah. Pasca berlakunya pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung tak satupun koalisi partai islam terbentuk untuk mendukung satu calon presiden. Padahal, jumlah suara yang dimiliki sudah sangat mendukung untuk itu.

Pada akhirnya, untuk kasus penguatan politik ini kita hanya bisa berharap kepada petinggi-petinggi parpol untuk dapat duduk bersama dan melepaskan *egoism* serta kepentingan kelompoknya masing-masing untuk dapat menyatukan visi dan misi bersama membangun kekuatan politik islam yang baru di Indonesia. Gerakan ekonomi-politik secara *structural* harus dibangun di atas semangat *ukhuwah islamiyah* yang kuat. Jangan sampai, ormas-ormas islam, parpol islam dan wakil-wakilnya yang ada di legislative serta eksekutif tidak mampu menahan arus gelombang pembangunan yang kini tampak semakin *liberal* dan *sekuler* dengan menjauhkan semangat dan nilai-nilai keagamaan di dalamnya baik dalam bentuk kebijakan tata ruang kota dan atau dalam bentuk kebijakan publik lain yang lebih luas.

KESIMPULAN

1. Lemahnya kita (umat islam) pada aspek ekonomi-politik membuat kita selalu saja kalah dan dirugikan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat baik dari sosial, politik dan ekonomi.
2. Kekalahan tersebut dapat dilihat dari konsep tata ruang kota yang tidak menunjukkan semangat *religious-culture* bagi umat islam yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.
3. Untuk itu, kegiatan-kegiatan *filantropi* seperti zakat, infak dan sedekah harusnya dapat dikelola dengan pendekatan pemberdayaan atau *community development*. Ini menjadi satu hal yang penting, sebab dana *filantropi* yang berputar setiap harinya cukuplah besar.
4. Selain itu usaha pemberdayaan umat juga harus dilakukan sedini mungkin dengan menyatukan gerakan dan tindakan yang sama mulai dari lapisan bawah hingga lapisan elit. Ceramah-ceramah agama harus mulai diarahkan untuk dapat menjawab persoalan individu muslim, baik secara spiritual dan atau sosial-ekonomi-politik.

5. Ormas islam dan partai politik berbasis islam harus dapat memainkan peran secara partisipatif dengan mengedepankan gerakan islam yang terstruktur dalam proses perencanaan dan kebijakan pembangunan.

SUMBER BACAAN

Ahmad Gaus AF, Filantropi dalam Masyarakat Islam, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.

Kuntowijoyo, Paradigma Umat Islam; Interpretasi Untuk Aksi, Jakarta: Mizan, 2008

Mujahiddin, Tata Ruang (Kota) dan Kekalahan Umat Islam Kolom Opini Harian Waspada, Diterbitkan Pada Tanggal 5 Mei 2015.

-- --, Islam Yang (Tak) Berdaya, Kolom Opini Harian Waspada, Diterbitkan Pada Tanggal 24 Juli 2015.

-- --, Membangun Gerakan Islam Yang Strukturalis, Kolom Opini Harian Waspada Pada Tanggal 07 Agustus 2015.

-- --, Posisi Umat Islam Pasca Pilkada, Kolom Opini Harian Waspada Pada Tanggal 16 Desember 2015.

<http://panjimas.com/news/2014/10/27/fui-indonesia-darurat-pemurtadan-bocoran-mabes-polri-27-juta-orang-murtad-tiap-tahun/> (diakses pda tanggal 24 April 2016).

<http://m.voaindonesia.com/a/cendekiawan-muslim-berharap-kongres-efektif-tingkatkan-peran-umat-islam-iindonesia/2639978.html> (diakses pda tanggal 24 April 2016)

Organised by:
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
and Collaboration with:
Islamic Development Management (ISDEV)
Universiti Sains Malaysia (USM)

